

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN TOLIKARA

Anwar^{1*}, Nur Aini², Ahmad Rizali Pawane³

^{1,2,3}Universitas Amal Ilmiah Yapisa Wamena, Papua Pegunungan

*Korespondensi: anwarsiola@gmail.com
<https://doi.org/10.61578/jls.5.2.47-55>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), operator OMSPAN, kepala kampung, dan bendahara kampung. Analisis dilakukan berdasarkan tujuh indikator efektivitas, yaitu akses, cakupan fungsi, frekuensi penggunaan, bias layanan, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OMSPAN efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi administrasi, serta ketepatan pelaporan Dana Desa. Sistem ini memudahkan proses monitoring dan pengawasan secara real time oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun, implementasi OMSPAN di tingkat kampung belum optimal karena masih terkendala keterbatasan jaringan internet, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan ketergantungan terhadap operator DPMK. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur kampung, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pendampingan yang berkelanjutan agar pemanfaatan OMSPAN dapat berjalan lebih efektif dan mandiri.

Kata Kunci : OMSPAN, Dana Desa, Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Online Monitoring of State Treasury and Budget System (OMSPAN) in Village Fund management in Tolikara Regency. The study employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of 12 participants, including officials of the Community and Village Empowerment Office (DPMK), OMSPAN operators, village heads, and village treasurers. The analysis was based on seven effectiveness indicators: accessibility, functional coverage, frequency of use, service bias, accuracy of service, accountability, and program suitability with village needs. The results of the study show that OMSPAN is effective in increasing transparency, accountability, administrative efficiency, and accuracy of village fund reporting. This system facilitates the monitoring and supervision process in real time by the local and central government. However, the implementation of OMSPAN at the village level is not optimal due to limited internet network, low human resource capacity, and dependence on DPMK operators. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village apparatus, strengthen information technology infrastructure, and provide continuous mentoring so that the use of OMSPAN can run more effectively and independently.

service accuracy, accountability, and program suitability to village needs. The results indicate that OMSPAN has been effective in improving transparency, accountability, administrative efficiency, and the accuracy of Village Fund reporting. The system facilitates real time monitoring and supervision by both local and central governments. However, its implementation at the village level has not been fully optimal due to limited internet access, inadequate human resource capacity, and dependence on DPMK operators. Therefore, strengthening the capacity of village officials, improving information technology infrastructure, and providing continuous technical assistance are necessary to optimize the utilization of OMSPAN and support independent village financial management.

Keywords: OMSPAN, Village Fund, effectiveness, accountability, transparency.

A. PENDAHULUAN

Penguatan pembangunan berbasis Desa merupakan salah satu agenda strategis nasional yang ditempuh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa (Kusumawardani et al., 2024). Desa diberikan peran yang semakin penting dalam penyediaan pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan berbasis masyarakat (Syakura et al., 2025). Penguatan posisi Desa tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Desa memperoleh alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Rosyadi & Luluardi, 2025). Implementasi kerangka regulasi ini bertujuan untuk mentransformasi desa menjadi entitas yang mandiri, berdaulat secara politik, serta berdaya secara ekonomi dengan tetap mengakomodasi kearifan lokal yang ada (Hulu et al., 2018; Lindawaty, 2023).

Sejak mulai disalurkan pada tahun 2015, Dana Desa terus mengalami peningkatan secara nasional sehingga menuntut adanya tata kelola keuangan Desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Nurchoiriyah et al., 2025). Dalam konteks tersebut, pengelolaan Dana Desa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas administratif, melainkan telah menjadi bagian penting dari tata kelola fiskal nasional dan instrumen pemerataan pembangunan daerah (Sutaryo et al., 2024). Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut mampu menjawab ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan (Cahyana & Suprasto, 2023; Suryani & Suprasto, 2021).

Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa, mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan tidak lagi dapat mengandalkan sistem manual yang rentan terhadap keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta potensi manipulasi data. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OMSPAN (Kurniawati, 2025).

OMSPAN merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk memonitor penyaluran dan pelaporan anggaran negara secara real time, termasuk penyaluran Dana Desa. Sistem ini memungkinkan proses monitoring, rekonsiliasi, validasi data, serta pelaporan dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Ramadhan & Wijaya, 2025).

Secara normatif, implementasi OMSPAN merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses rekonsiliasi data, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat jejak audit digital dalam pengawasan keuangan publik (Kurniawati, 2025). Penerapan OMSPAN mendukung efektivitas monitoring anggaran dari aspek akurasi, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Syakura et al., 2025).

Fenomena keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tolikara menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sekadar keterlambatan administratif. Kabupaten Tolikara sebagai daerah dengan kondisi geografis pegunungan dan persebaran Kampung yang luas masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jaringan internet, perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital aparatur Kampung. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi OMSPAN belum berjalan optimal, khususnya pada tingkat pemerintah Kampung sebagai pelaksana utama pengelolaan Dana Desa (Haeranah et al., 2025). Keterbatasan teknis ini diperparah oleh tantangan infrastruktur teknologi informasi yang menghambat alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara daring (Roekminiati & Sunarya, 2021), (Anggraeni & Mursyidah, 2025). Mengakibatkan ketimpangan dalam akses informasi dan pelaporan keuangan antara wilayah pusat pemerintahan kabupaten dengan daerah yang terisolasi secara geografis (Adib & Susanti, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas penggunaan aplikasi OMSPAN dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas implementasi sistem monitoring keuangan berbasis digital pada daerah dengan karakteristik geografis dan keterbatasan infrastruktur yang tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa, khususnya melalui penguatan kapasitas aparatur, penyediaan infrastruktur digital, dan optimalisasi sistem monitoring keuangan Desa berbasis teknologi informasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena penggunaan aplikasi OMSPAN dalam konteks tertentu, yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tolikara. Menurut Creswell, (1998), studi kasus merupakan suatu pendekatan penelitian yang menelaah fenomena tertentu dalam suatu kegiatan, program, atau institusi dengan mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam melalui berbagai teknik pengumpulan data.

Sejalan dengan hal tersebut, Yin, (2009) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata (real life context), terutama ketika terdapat kesenjangan antara fenomena yang diamati dengan konteksnya. Dalam penelitian ini, konteks tersebut adalah pengelolaan Dana Desa melalui sistem aplikasi OMSPAN.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini berfokus pada satu objek kajian, yaitu efektivitas penggunaan aplikasi OMSPAN dalam pengelolaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tolikara. Melalui pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang mendalam

mengenai realitas penggunaan OMSPAN, baik dari sisi manfaat, kendala, maupun implikasinya terhadap tata kelola Desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan Aplikasi OMSPAN dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara. Analisis dilakukan berdasarkan tujuh indikator efektivitas, yaitu akses, cakupan fungsi, frekuensi penggunaan, bias layanan, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan kampung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan yang terdiri atas pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), operator OMSPAN tingkat kabupaten, kepala kampung, serta bendahara atau operator keuangan kampung.

1. Akses Penggunaan OMSPAN

Akses merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara. Indikator ini berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam mengakses sistem, ketersediaan jaringan internet, serta kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi. Kemudahan akses menjadi faktor utama karena menentukan kelancaran proses pelaporan, monitoring, dan pengawasan Dana Desa yang dilakukan secara digital.

Berdasarkan hasil penelitian, OMSPAN telah memberikan kemudahan akses bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa. Sistem yang berbasis daring memungkinkan proses monitoring, pengawasan, dan pelaporan dilakukan secara real time sehingga mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, seluruh informasi terkait penyaluran dan realisasi Dana Desa dapat diakses melalui satu sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pengendalian dan evaluasi program. Kemudahan akses tersebut juga didukung oleh peningkatan kualitas jaringan internet di lingkungan pemerintah daerah. Informan menyampaikan bahwa penggunaan jaringan berbasis Starlink membantu memperlancar akses terhadap OMSPAN, terutama dalam proses pengunggahan dokumen dan pelaporan keuangan. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja operator DPMK karena proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan sebelumnya.

Namun demikian, akses OMSPAN belum berjalan optimal di tingkat kampung. Kondisi geografis Kabupaten Tolikara yang didominasi wilayah pegunungan menyebabkan ketersediaan jaringan internet masih terbatas di beberapa wilayah. Sebagian kepala kampung dan bendahara kampung mengalami kesulitan mengakses aplikasi karena sinyal yang tidak stabil, keterbatasan perangkat pendukung, serta rendahnya kemampuan penggunaan teknologi informasi. Akibatnya, proses inputan dan pengiriman data masih banyak bergantung pada operator DPMK di tingkat kabupaten.

Selain faktor jaringan, keterbatasan kemampuan teknis aparatur kampung juga menjadi hambatan dalam penggunaan OMSPAN. Sebagian informan mengakui belum

memahami seluruh prosedur penggunaan aplikasi dan masih memerlukan pendampingan dalam proses pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi OMSPAN tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa OMSPAN telah meningkatkan aksesibilitas pengelolaan Dana Desa di tingkat pemerintah daerah. Namun, efektivitas akses di tingkat kampung masih perlu ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur jaringan internet, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi aparat kampung agar mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.

2. Cakupan Fungsi OMSPAN

Cakupan fungsi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana aplikasi OMSPAN mampu mendukung seluruh proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh. Semakin lengkap fungsi yang tersedia dalam suatu sistem, maka semakin besar kemampuannya dalam membantu pengguna melaksanakan tugas administrasi, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian keuangan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara, OMSPAN berperan sebagai sistem yang menghubungkan pemerintah kampung, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam satu jaringan pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, OMSPAN telah mencakup seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan penyaluran Dana Desa, realisasi penggunaan anggaran, serta status pelaporan dari masing-masing kampung secara lebih cepat dan akurat. Informasi yang tersedia dalam OMSPAN juga membantu pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di daerah secara berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pejabat dan operator DPMK menilai OMSPAN telah menyediakan fungsi yang cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Berbagai informasi terkait realisasi anggaran, status pencairan dana, revisi anggaran, pelaporan kegiatan, hingga monitoring penggunaan dana dapat diakses melalui satu sistem yang terhubung langsung dengan Kementerian Keuangan. Keberadaan sistem yang terintegrasi ini mengurangi kebutuhan penggunaan dokumen manual dan mempercepat proses koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Selain itu, OMSPAN juga memberikan kemudahan dalam proses pengawasan dan pengendalian anggaran. Data yang tersimpan dalam sistem dapat diperbarui secara berkala sehingga pengguna dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan penggunaan Dana Desa secara real time. Kondisi ini membantu pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap kampung yang telah menyampaikan laporan maupun kampung yang masih mengalami keterlambatan pelaporan.

Meskipun memiliki cakupan fungsi yang lengkap, pemanfaatan seluruh fitur OMSPAN masih belum optimal di tingkat kampung. Sebagian besar kepala kampung dan bendahara kampung hanya memahami fungsi OMSPAN sebagai sarana pelaporan administrasi keuangan. Mereka belum sepenuhnya memahami berbagai fitur lain yang tersedia, seperti monitoring realisasi anggaran, penelusuran data keuangan, maupun

pemanfaatan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Akibatnya, penggunaan sistem masih lebih banyak dilakukan oleh operator DPMK dibandingkan oleh aparat kampung itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan fungsi OMSPAN secara sistem telah memadai dan mampu mendukung seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa. Namun, optimalisasi fungsi sistem masih dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar seluruh fungsi OMSPAN dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung tata kelola Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Frekuensi Penggunaan OMSPAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan OMSPAN relatif tinggi di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara. Sistem ini digunakan secara rutin dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari proses pengajuan penyaluran dana, pelaporan kegiatan, monitoring realisasi anggaran, hingga evaluasi penggunaan Dana Desa. Bagi operator dan pejabat DPMK, OMSPAN telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari karena seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan Dana Desa terpusat dalam sistem tersebut.

Intensitas penggunaan OMSPAN paling tinggi terjadi pada periode pelaporan dan pencairan Dana Desa. Pada tahap ini, seluruh data yang berasal dari kampung harus diverifikasi dan dipastikan kesesuaiannya sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Proses tersebut menyebabkan operator DPMK harus mengakses OMSPAN secara berulang untuk melakukan pengecekan, pembaruan data, serta pemantauan status laporan dari masing-masing kampung. Tingginya frekuensi penggunaan ini menunjukkan bahwa OMSPAN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan Dana Desa di tingkat kabupaten.

Selain digunakan untuk pelaporan, OMSPAN juga dimanfaatkan sebagai sarana monitoring perkembangan penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Melalui data yang tersedia secara real time, pemerintah daerah dapat mengetahui kampung yang telah menyampaikan laporan maupun kampung yang masih mengalami keterlambatan. Informasi tersebut membantu DPMK dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan kepada kampung yang memerlukan perhatian lebih dalam proses pelaporan.

Sebaliknya, penggunaan OMSPAN di tingkat kampung masih relatif rendah. Kepala kampung dan bendahara kampung umumnya hanya berperan dalam menyiapkan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan, bukti pengeluaran, dan dokumen administrasi lainnya. Sementara itu, proses penginputan data, verifikasi, dan pengiriman laporan melalui OMSPAN lebih banyak dilakukan oleh operator DPMK di tingkat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung aparat kampung dalam penggunaan sistem masih terbatas.

Rendahnya frekuensi penggunaan OMSPAN di tingkat kampung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kemampuan teknis, kurangnya pemahaman terhadap fitur aplikasi, serta kendala jaringan internet yang masih terjadi di beberapa wilayah. Akibatnya, aparat kampung cenderung bergantung pada bantuan operator DPMK

dalam proses pelaporan digital. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa meskipun OMSPAN telah digunakan secara intensif di tingkat pemerintah daerah, pemanfaatannya di tingkat kampung belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan dukungan serta pendampingan yang berkelanjutan.

4. Bias Layanan dalam Penggunaan OMSPAN

Bias layanan dalam penggunaan OMSPAN merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidaktepatan, atau keterlambatan dalam proses pengelolaan dan pelaporan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bias layanan yang terjadi dalam penggunaan OMSPAN di Kabupaten Tolikara tidak berasal dari sistem aplikasi itu sendiri, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan pengguna dan kondisi lingkungan kerja.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesalahan input data dan keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan oleh keterlambatan penyampaian dokumen dari kampung kepada DPMK. Dalam beberapa kasus, dokumen yang disampaikan belum lengkap atau masih memerlukan perbaikan sehingga proses verifikasi dan penginputan data ke dalam sistem menjadi tertunda. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaporan dan proses administrasi yang harus dilakukan secara berjenjang dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat.

Selain faktor kelengkapan dokumen, keterbatasan kemampuan teknis aparat kampung juga menjadi penyebab munculnya bias layanan. Sebagian besar aparat kampung masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan berbasis digital dan penggunaan aplikasi OMSPAN. Akibatnya, masih ditemukan kesalahan dalam penyusunan data maupun penyampaian dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pelaporan. Kondisi ini menyebabkan operator DPMK harus melakukan pemeriksaan dan penyesuaian data sebelum laporan dapat diproses lebih lanjut.

Kendala jaringan internet juga turut memengaruhi kualitas layanan OMSPAN. Beberapa wilayah kampung masih mengalami keterbatasan akses internet yang menyebabkan proses pengiriman data dan komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi tidak lancar. Ketika jaringan mengalami gangguan, proses pelaporan sering kali tertunda sehingga berdampak pada ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan. Namun demikian, kendala tersebut lebih berkaitan dengan kondisi infrastruktur daripada kelemahan sistem OMSPAN itu sendiri.

Meskipun terdapat berbagai hambatan operasional, OMSPAN dinilai memiliki mekanisme pengendalian yang baik dalam menjaga kualitas data dan transparansi pelaporan. Seluruh aktivitas pengguna terekam dalam sistem melalui fitur audit trail yang memungkinkan setiap perubahan data dapat ditelusuri kembali. Fitur ini memudahkan proses verifikasi, pengawasan, dan evaluasi apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan. Dengan adanya mekanisme tersebut, risiko manipulasi data dapat diminimalkan dan proses pertanggungjawaban menjadi lebih jelas.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bias layanan dalam penggunaan OMSPAN lebih banyak dipengaruhi oleh aspek operasional, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi infrastruktur pendukung daripada kelemahan sistem aplikasi. Oleh karena itu, upaya mengurangi bias layanan perlu difokuskan pada peningkatan

kapasitas aparatur kampung, penguatan koordinasi antara kampung dan DPMK, serta perbaikan akses jaringan internet agar proses pelaporan dapat berjalan lebih tepat waktu dan akurat.

5. Ketepatan Layanan OMSPAN

Dari aspek ketepatan layanan, OMSPAN dinilai lebih efektif dibandingkan sistem manual yang digunakan sebelumnya dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara. Penggunaan sistem berbasis digital memungkinkan proses pelaporan, monitoring, dan pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Informasi yang sebelumnya harus dikumpulkan dan direkap secara manual kini dapat diakses melalui satu sistem yang terintegrasi, sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.

Keunggulan utama OMSPAN terletak pada kemampuan sistem dalam menyediakan data secara real time. Melalui fitur tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pelaporan dan realisasi anggaran dari setiap kampung tanpa harus menunggu laporan manual. Kondisi ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama dalam melakukan verifikasi laporan dan penyaluran Dana Desa. Selain itu, ketersediaan data yang diperbarui secara berkala juga membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pejabat dan operator DPMK menilai OMSPAN mampu meningkatkan ketepatan informasi yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan. Sistem secara otomatis menyajikan data yang telah diinput sehingga memudahkan proses pengecekan dan pengawasan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, setiap perubahan data dapat diketahui dengan cepat sehingga potensi terjadinya kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

Namun demikian, tingkat ketepatan layanan OMSPAN masih sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang disampaikan oleh kampung. Apabila dokumen yang dikirimkan tidak lengkap, mengalami kesalahan, atau disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses verifikasi dan pelaporan juga akan mengalami keterlambatan. Dalam kondisi tersebut, operator DPMK harus melakukan pemeriksaan ulang dan berkoordinasi kembali dengan aparat kampung untuk melengkapi data yang diperlukan sebelum laporan dapat diproses lebih lanjut. Selain faktor kelengkapan dokumen, kemampuan teknis aparat kampung juga turut memengaruhi ketepatan layanan. Sebagian aparat kampung masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi dan penyusunan dokumen pelaporan yang sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini menyebabkan proses pelaporan sering kali memerlukan pendampingan dari operator DPMK agar data yang disampaikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun OMSPAN telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung ketepatan layanan, keberhasilan sistem tetap memerlukan dukungan dari pengguna sebagai penyedia data utama. Ketepatan pelaporan tidak hanya ditentukan oleh kualitas aplikasi, tetapi juga oleh ketepatan waktu, kelengkapan data, serta kemampuan aparatur kampung dalam menyusun dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antara kampung dan DPMK menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketepatan layanan OMSPAN dalam pengelolaan Dana Desa.

6. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan Dana Desa setelah penggunaan OMSPAN di Kabupaten Tolikara. Penerapan sistem ini telah mendorong proses pengelolaan keuangan yang lebih tertib, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari proses penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan, dapat direkam dan dipantau melalui sistem digital yang terintegrasi. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa secara berkelanjutan.

Keberadaan fitur audit trail dalam OMSPAN menjadi salah satu faktor yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Setiap aktivitas pengguna, termasuk proses input, perubahan, maupun pembaruan data, tercatat secara otomatis dalam sistem. Dengan adanya jejak digital tersebut, setiap data yang masuk dapat ditelusuri kembali apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pelaporan. Mekanisme ini secara tidak langsung mampu mengurangi peluang terjadinya manipulasi data serta meningkatkan kehati-hatian aparatur dalam menyusun laporan keuangan.

Selain itu, transparansi informasi yang disediakan OMSPAN juga memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Data realisasi anggaran, status penyaluran dana, dan perkembangan pelaporan dari setiap kampung dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat. Informasi yang tersedia secara real time membantu pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi, pembinaan, serta mengambil langkah tindak lanjut apabila ditemukan kendala dalam pengelolaan Dana Desa.

Meskipun demikian, tingkat akuntabilitas di tingkat kampung masih belum sepenuhnya mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kepala kampung dan bendahara kampung masih memerlukan pendampingan dari operator DPMK dalam proses penginputan, pemeriksaan, dan verifikasi data. Keterbatasan kemampuan teknis serta minimnya pengalaman dalam penggunaan aplikasi digital menyebabkan aparat kampung belum mampu mengelola seluruh proses pelaporan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur kampung melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, OMSPAN tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Kampung

Secara umum, OMSPAN dinilai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Dana Desa karena mampu mendukung proses pelaporan, monitoring, dan pengawasan keuangan desa secara terintegrasi. Sistem ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, kesesuaian sistem dari sisi pengguna masih menghadapi sejumlah kendala. Aparat kampung menilai bahwa OMSPAN masih memerlukan kemampuan teknis

yang cukup tinggi sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia di wilayah kampung. Keterbatasan pendidikan, rendahnya literasi digital, serta minimnya pelatihan menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatan sistem secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan antarmuka aplikasi, peningkatan kualitas pendampingan teknis, serta pelatihan yang berkelanjutan agar OMSPAN dapat dimanfaatkan secara lebih efektif oleh seluruh aparat kampung.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tolikara secara umum telah berjalan efektif. OMSPAN mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan pelaporan Dana Desa melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Selain itu, OMSPAN memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa secara real time.

Dari aspek akses, cakupan fungsi, frekuensi penggunaan, ketepatan layanan, dan akuntabilitas, OMSPAN telah memberikan manfaat yang signifikan bagi DPMK Kabupaten Tolikara. Namun, implementasi di tingkat kampung masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya kemampuan teknologi informasi aparatur kampung, serta masih tingginya ketergantungan terhadap operator DPMK dalam proses pelaporan dan penginputan data. Bias layanan yang terjadi umumnya bukan berasal dari sistem OMSPAN, melainkan disebabkan oleh keterlambatan penyampaian data, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala infrastruktur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan OMSPAN diperlukan penguatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet.

Dengan demikian, OMSPAN telah menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, meskipun masih diperlukan berbagai upaya perbaikan agar pemanfaatannya dapat berjalan optimal hingga tingkat kampung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A., & Susanti, A. (2025). Analisis penerapan sistem digitalisasi keuangan di Kantor Desa Bergolo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(4), 471–479. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1300>
- Anggraeni, F. D., & Mursyidah, L. (2025). The implementation of e-government by means of the online monitoring application for state treasury and budget (OMSPAN) in Sumorame Village, Sidoarjo Regency. *Proceeding of International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 560–572. <https://doi.org/10.61796/icossh.v2i2.299>
- Cahyana, P. G., & Suprasto, H. B. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33 (2), 556–568. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p19>
- Haeranah, Johannes, A. W., Alwany, T., & Setiawan, I. (2025). Human resource capacity in strengthening village fund governance at the grassroots level in Bone Bolango District, Gorontalo Province. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 13(2), 100–118. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v13i2.5747>

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Kurniawati, R. (2025). Dampak digitalisasi akuntansi terhadap efisiensi pelaporan keuangan UMKM. *JACTA: Journal of Accounting and Tax*, 3 (1), 36–41. <https://doi.org/10.58738/jacta.v3i1.964>
- Kusumawardani, D. M., Wiguna, C., Rakhmadni, D. P., & Karo, E. M. Br. (2024). Implementasi metode Ward & Peppard dalam perancangan blueprint Smart Village Sudagaran. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14(2), 123–130. <https://doi.org/10.21456/vol14iss2pp123-130>
- Lindawati, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14 (1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Nurchoiriyah, A. P., Sofia, E., Beri, F., & Djasuli, M. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban BLU di Indonesia: Studi literatur 2022–2025. <https://doi.org/10.31959/jm.v14ix.2983>
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4 (4), 303–315. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2021). Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi (Studi kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 5 (1), 17–30. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v5i1.3177>
- Rosyadi, M. F., & Luluardi, Y. D. (2025). Politik hukum penambahan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. *Manabia Journal of Constitutional Law*, 5 (2), 249–274. <https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13932>
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31 (8), 2011–2024. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p11>
- Sutaryo, S., Arifin, T., Aryani, Y. A., Rahmawati, I., & Nurrahmawati, A. (2024). Evaluation of local public service agency financial management pattern (PPK-BLUD) implementation at Puskesmas in Karanganyar Regency. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 8 (3). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i3.14134>
- Syakura, F. P., Tondy, C. J., Putri, A., & Risti, S. F. (2025). Reforma agraria: Overview implementasi dan hambatannya dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.